

BAB I PENDAHULUAN



(KTT) PBB di Rio de Janeiro Brazil, saat itu dibahas mengenai lingkungan dan

¹ G. Porter, and Brown. J, W. 1996, *Global Environmental Politics*, Boulder : Westview Press. Hal.1 dalam Robert Jackson & Georg Dorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Terj), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal.324

² Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009, *Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema*, (Terj), Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal.380

keberlangsungannya menjadi agenda global.³ Berbagai isu yang didiskusikan dalam konferensi ini mulai dari kemiskinan, pencemaran, pertanian sampai lapisan udara dipermukaan bumi. Tujuan utama dari konferensi ini adalah mencanangkan pembangunan ekonomi dengan mengurangi perusakan lingkungan. Nama resmi dari konferensi ini adalah *United Nation Confrence on Enviroment and Development*.⁴

Mengatasi isu perubahan iklim, pertemuan di Rio de Janero, Brazil tersebut menginisiasi terbentuknya sebuah rezim internasional. Rezim internasional tersebut ditujukan untuk memfasilitasi kesepakatan yang dibuat oleh negara peserta anggota.⁵ Namun demikian, rezim tidak terbentuk karena harus ada satu kebulatan suara dalam pembentukannya oleh negara-negara peserta anggotanya. Sedangkan dalam hal ini masih ada negara yang memveto. Kondisi tersebut membuat isu pembahasan mengenai penanganan perubahan iklim masih dalam tahap pembentukan rezim yaitu *Framework Convention*.⁶ *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dalam hal ini adalah bagian dari tahap pembentukan rezim yang membahas mengenai penanganan isu perubahan iklim.

Setiap tahun UNFCCC melaksanakan pertemuan yaitu *Conference of Parties* (COP) yang menghasilkan poin-poin kesepakatan untuk mengatasi

³ Makarim Wibisono, 2015, *Tantangan Diplomasi Multilateral*, Jakarta : LP3ES, hal. 85

⁴ Teuku May Rudy, 1993, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung : Refika Aditama, Hal. 169

⁵ Yanuar Ikbar, 2014, *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*, Bandung : Refika Aditama, hal. 280

⁶ Disampaikan dalam mata kuliah Politik Lingkungan oleh Septian Nur Yekti, pada tanggal 16 Maret 2016, di Universitas Muhammadiyah Malang

lingkungan diantaranya pertemuan yang signifikan menghasilkan beberapa poin kesepakatan yaitu *Kyoto Protocol* mulai di adopsi dalam COP3 di Berlin.⁷ *Kyoto Protocol* sendiri menghasilkan kesepakatan yang mengatur dan mengikat para pihak negara industri secara hukum untuk melaksanakan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama.⁸ Namun pada akhirnya *Kyoto Protocol* dalam COP 15 di Copenhagen tidak berhasil menuai kesepakatan. Setelah itu *Montreal Protocol* yang menghasilkan kesepakatan bahwa pengurangan penggunaan bahan *Cloro Floro Carbon* (CFC) yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon dalam COP11. Pertemuan selanjutnya menghasilkan mengenai pendanaan untuk menciptakan lingkungan hidup yang layak dalam COP17 di Durban.⁹

COP21 dihadiri oleh 195 negara pada akhir tahun 2015 di Paris, yang mana tujuannya ialah untuk menegosiasikan perjanjian yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang merupakan dampak utama dari perubahan iklim. Berikut adalah hasil kesepakatan dalam COP21 yaitu *Pertama*, upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni di bawah 2 derajat celsius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat celsius. *Kedua*, sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan. *Ketiga*, upaya

⁷ *COP - What's it all about?*, diakses dalam <http://www.cop21paris.org/about/cop21> (05/04/2016 pk1 08:10 WIB)

⁸ *Tinjauan Umum tentang Protokol Kyoto*, diakses dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25539/3/Chapter%20II.pdf> (03/11/2016 pk1 00:09 WIB)

⁹ *COP - What's it all about?*, diakses dalam <http://www.cop21paris.org/about/cop21> (05/04/2016 pk1 08:10 WIB)

adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim. *Keempat*, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan. *Kelima bantuan*, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.¹⁰ Pada COP21 tahun 2015 di Paris negara-negara peserta anggota menyetujui *Paris Agreement* yakni kesepakatan untuk menangani pemanasan global sesuai lima poin yang dihasilkan.¹¹

Pada setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam COP posisi negara industri adalah sangat penting. Sebab negara industri adalah penyumbang utama emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini sendiri memiliki dampak negatif terhadap persediaan pangan dunia, kekeringan panjang atau banjir yang menghambat produksi pertanian.¹² Selain itu, dampak yang ditimbulkan dapat dilihat saat kebakaran hutan di Indonesia yang disebabkan fenomena iklim El Nino¹³, durasinya bertambah panjang dari biasanya. Akibatnya negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand terkena kabut asap selama berbulan-bulan. Selain itu, kemarau panjang dan kekeringan dipicu

¹⁰ *Beberapa Kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim Paris*, diakses dalam <http://internasional.kompas.com/read/2015/12/13/09090031/Beberapa.Kesepakatan.Konferensi.Perubahan.Iklim.Paris> (19/04/2017 pkl 08.36 WIB)

¹¹ *195 negara setuju "Kesepakatan Paris"*, diakses dalam <http://www.antaranews.com/berita/534820/195-negara-setujui-kesepakatan-paris> (19/04/2017 pkl 08.35 WIB)

¹² *Perubahan Iklim Picu Kelaparan*, diakses dalam <http://www.dw.com/id/perubahan-iklim-picu-kelaparan/av-18980926> (02/11/2016 pkl 22:53 WIB)

¹³ El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudera Pasifik sekitar ekuator khususnya di bagian tengah dan timur. Karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling terhubung, maka menyebabkan penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada akhirnya memengaruhi kondisi iklim Bumi. (*BMKG: El Nino Itu Bukan Gelombang Panas* diakses dalam <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150731135702-199-69326/bmkg-el-nino-itu-bukan-gelombang-panas/> (02/12/2016 pkl 16.40 WIB)

perubahan iklim, menimbulkan masalah sosial di negara berkembang. Terutama pernikahan dini. Pasalnya orang tua tidak mampu memberi makan keluarganya. Menikahkan dini anak perempuan berarti mengurangi beban keluarga dan dari mahar anaknya bisa diberi makan.

Di belahan bumi lainnya terjadi fenomena kebalikan. Curah hujan makin tinggi dan badai makin sering melanda. Banjir yang tidak kenal musim memaksa jutaan orang bermigrasi. Bencana lingkungan di kawasan Afrika dan Asia Selatan memicu gagal panen, kelaparan dan wabah penyakit.¹⁴ Negara-negara yang merupakan emisi karbon terbanyak ialah China, Amerika Serikat, Serikat Eropa, India, Rusia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada, dan Indonesia.¹⁵ Amerika ialah salah satu emitor terbesar yakni 5,300,000 kilo ton (kt) dan 16.6 ton (t). Hal ini juga disampaikan oleh Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat dalam pembukaan KTT Perubahan Iklim (COP21) di Paris.¹⁶

Sejauh ini posisi Amerika Serikat dalam setiap konferensi didominasi sikap menolak. Hal tersebut dapat dilihat pada sikap Amerika Serikat terhadap protokol Kyoto dalam COP3, pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan dalam COP15. Selanjutnya protokol Montreal, dalam COP 17 Amerika Serikat menolak untuk meratifikasi hasil kesepakatan tersebut.¹⁷ Sikap Amerika Serikat

¹⁴ *Dampak Perubahan Iklim Sudah Landa Dunia*, diakses dalam <http://www.dw.com/id/dampak-perubahan-iklim-sudah-landa-dunia/g-18873686> (02/11/2016 pkl 22:57 WIB)

¹⁵ *Sepuluh Negara Penghasil Emisi Karbon Dioksida Terbesar*, diakses dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151130171044-137-94992/sepuluh-negara-penghasil-emisi-karbon-dioksida-terbesar/> (07/10/2016 pkl 12:59 WIB)

¹⁶ *Obama Akui AS Penyebab Masalah Perubahan Iklim*, diakses dalam <http://news.okezone.com/read/2015/12/01/18/1258690/obama-akui-as-penyebab-masalah-perubahan-iklim> (6/04/2016 pkl 20:42 WIB)

¹⁷ *Warga Amerika Tak Peduli Isu Perubahan Iklim, Kenapa?* diakses dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/05/061716190/warga-amerika-tak-peduli-isu-perubahan-iklim-kenapa> (13/10/2016 pkl 23:30 WIB)

dalam rezim lingkungan global juga tercermin pada COP 13 di Bali. Amerika Serikat menolak usulan mengenai pengurangan emisi karbon sebanyak 25 hingga 40 persen kepada anggota annex I, hal ini yang tercantum pada *Bali Road Map*. Penolakan atas usulan beban pengurangan tersebut karena negara China dan India tidak tergolong dalam beban pengurangan emisi gas rumah kaca.¹⁸ Pada COP21 di Paris, Amerika Serikat sebagai bagian dari COP21 berjanji akan menargetkan mengurangi gas emisi sebanyak 80 persen pada tahun 2050.¹⁹ Menarik kiranya penulis meneliti kesepakatan yang terjadi dalam COP21 yang menghasilkan *Paris Agreement*. Pada akhirnya AS meratifikasi hasil COP21 bersama dengan China. Penulis akan meneliti pengaruh level domestik dan level internasional yang pada akhirnya perubahan sikap Amerika Serikat dalam perjanjian lingkungan merupakan hal yang menarik sehingga penulis mengangkat judul **Analisa Alasan Amerika Serikat meratifikasi *Paris Agreement***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Amerika Serikat meratifikasi *Paris Agreement* pada COP21 di Paris?”

1.3 Tujuan Penelitian

¹⁸ Alfikry, *Op. Cit.*

¹⁹ *Tiongkok dan AS Sepakat Kurangi Emisi Gas*, diakses dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141113000903-113-11172/tiongkok-dan-as-sepakat-kurangi-emisi-gas/> (6/04/2016 pkl 21:00 WIB)

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui alasan Amerika Serikat meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2015 dengan menggunakan teori *Two-level games diplomacy*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bisa mendapatkan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Akademisi

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini, yakni untuk menambah referensi kajian ilmu Hubungan Internasional. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka bagi para akademisi untuk melihat lebih jauh pola interaksi Amerika Serikat dalam membuat keputusan luar negeri yang dipengaruhi dari dalam negeri dan luar negeri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa dapat dijadikan rujukan oleh para pembuat kebijakan ataupun analis lingkungan untuk melihat pola mengenai proses pengambilan kebijakan internasional Amerika Serikat yang berkaitan dengan lingkungan, dalam hal ini alasan Amerika Serikat meratifikasi *Paris Agreement* yang dipengaruhi oleh kondisi level domestik dan level internasional.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan ini yang berkaitan dengan masalah perilaku suatu negara dalam proses pengambilan keputusan dalam kancah internasional yang dipengaruhi oleh level domestik. Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Sulistyoko Khoirul Mala, dengan judul penelitiannya “*Two-Level Game Jerman dalam Merespon Rencana Bailout Uni Eropa ke Yunani*”,²⁰ penelitian ini membahas mengenai krisis Uni Eropa (UE) yang berawal dari krisis Yunani. Krisis Yunani ini dianggap mengancam integrasi UE karena telah meluas ke negara-negara UE lainnya. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemimpin UE berniat untuk melakukan bailout pada Yunani. Pada awalnya, Jerman tidak menyetujui rencana bailout UE ke Yunani itu karena persoalan dalam negerinya. Namun akhirnya, Jerman menyetujui rencana itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan *two-level game theory* yang menggambarkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua level negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi level I (internasional) dan level II (domestik). Dalam *two-level game theory* juga menjelaskan tentang *win-set* yang memegang peranan besar dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. Besar kecilnya *win-set* ini menentukan diratifikasi atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat pada level I. peneliti skripsi ini juga menggunakan konsep bailout untuk menjelaskan bantuan yang diberikan UE untuk mengatasi krisis Yunani.

²⁰ Sulistyoko Khoirul Mala, 2013, *Two-Level Games Jerman dalam Merespon Rencana Bailout Uni Eropa ke Yunani*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang (tidak dipublikasikan)

Hasil penelitian tersebut, yaitu dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah bailout tidak langsung keluar begitu saja. Ada negosiasi yang terjadi antara pemerintah pada level I (internasional) dan level II (domestik) hingga akhirnya Jerman menyetujui rencana bailout UE ke Yunani. Pemberian bailout tersebut untuk mengatasi krisis Yunani dan menyelamatkan UE dari dampak krisis yang lebih buruk.

Penelitian di atas sebagai perbandingan dalam penelitian ini bahwa, peneliti menggunakan teori yang sama yaitu *two-level game diplomacy*, namun berbeda dalam kasusnya, yakni penulis melihat kasus adanya keputusan negara Amerika Serikat dalam meratifikasi *Paris Agreement* yang dipengaruhi oleh level domestik dan internasional.

Kedua, penelitian skripsi lain sebagai penelitian terdahulu lainnya ialah skripsi yang ditulis oleh Dewi Robi'ah dengan judul "Penolakan Amerika Serikat Terhadap Ratifikasi Protokol Kyoto pada Era George Walker Bush",²¹ penelitian ini membahas mengenai penolakan Amerika Serikat terhadap ratifikasi Protokol Kyoto, karena AS merupakan penyumbang emisi terbesar di dunia. Protokol Kyoto tersebut merupakan suatu perjanjian lingkungan internasional mengenai perubahan iklim untuk mengurangi pemanasan global dan menstabilkan efek rumah kaca. Penolakan AS yang dikemudian hari menjadi perdebatan, dan mengancam dari masa depan protokol Kyoto, hal ini kemudian yang menyebabkan perjanjian ini tidak menemukan kesepakatan. Penelitian ini

²¹ Dewi Robi'ah, 2010, *Penolakan Amerika Serikat Terhadap Ratifikasi Protokol Kyoto Pada Era George Walker Bush*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang (tidak dipublikasikan)

menggunakan metode eksplanatif argumentative, tingkat analisa negara dan bangsa yaitu model korelasionis. Teori yang digunakan teori politik luar negeri dengan model aktor rasional yang menjelaskan perilaku Presiden Amerika Serikat George Walker Bush dalam membuat kebijakan. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep *Free Rider*, dan *National interest*. Konsep tersebut merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan alasan Presiden Bush dalam penolakan ratifikasi protokol Kyoto.

Hasil penelitian skripsi Dewi Robi'ah ialah penolakan AS untuk meratifikasi perjanjian Protokol Kyoto. Melalui konsep *national interest* yang digunakan alasan penolakan AS terhadap ratifikasi Protokol Kyoto ialah adanya kepentingan nasional yang dipertahankan yaitu kepentingan ekonomi, yang biasanya sangat berdampak pada GDP dan merugikan perekonomian AS. Alasan lainnya yaitu dikarenakan negara-negara China dan India tidak meratifikasi protokol Kyoto. Melalui aktor rasional Presiden Amerika Serikat sebagai aktor rasional menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto tersebut dengan alasan ekonomi negara Amerika Serikat yang melihat kalkulasi untung rugi ketika akan meratifikasi protokol Kyoto. Kalkulasi rugi Bush lebih banyak dari pada keuntungan, oleh karena itu AS mengimplementasikan kebijakan luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasionalnya. AS memilih untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut.

Penelitian di atas, menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini, bahwa peneliti melihat pola yang dilakukan Amerika Serikat dalam melihat isu yang berkaitan dengan lingkungan. Penelitian Dewi Robi'ah juga akan menjadi

acuan dalam melihat pola Amerika Serikat dalam permasalahan perjanjian internasional masalah lingkungan yang selalu menolak, namun saat COP 21 Amerika Serikat meratifikasi hasil perjanjian tersebut yaitu *Paris Agreement* .

Ketiga, Penelitian lain sebagai bahan pertimbangan sebuah tesis yang ditulis oleh Jani Mediawati Sasanti dengan judulnya “Diplomasi Lingkungan Amerika Serikat dalam Konvensi Perubahan Iklim (1992-2002)”²² yang membahas mengenai diplomasi lingkungan AS dalam konvensi Perubahan Iklim pada periode 1992-2002 yang terbagi atas periode sampai dengan terbentuknya Protokol Kyoto dan setelah Protokol Kyoto, dengan memfokuskan pada diplomasi lingkungan yang dijalankan AS pada periode tersebut dan bagaimana AS mengatasi berbagai permasalahan perubahan global. Dalam perkembangannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Tesis ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ilmu hubungan internasional, mengingat unit yang dianalisa tidak hanya negara (dalam hal ini AS dan negara berkembang), tetapi juga aktor non negara (NGO dan kelompok industri). Selain itu tesis ini juga memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang masalah lingkungan tersebut serta diplomasi AS dalam pembuatan protokol Kyoto sebagai implementasi dari *United Nation Framework Convention on*

²² Jani Media Sasanti, 2002, *Diplomasi Lingkungan Amerika Serikat dalam Konvensi perubahan iklim (1992-2002)*, Thesis Universitas Indonesia (dipublikasikan)

Climate Change yang menjadi payung perjanjian perubahan iklim global. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah diplomasi lingkungan AS sebagai negara besar di dunia terhadap isu lingkungan yang merupakan agenda baru yang mengemuka dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Menggunakan kerangka pemikiran Donald E. Nuechterlein mengenai kepentingan nasional, pemikiran Cloumbus mengenai tujuan dari politik luar negeri, teori Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri, serta teori Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri, pemikiran Robert L. Paarlberg mengenai tipe kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan, pemikiran Diamond dan Donald mengenai *multi-track diplomacy*, pemikiran Suskind dan Thomas mengenai peran *non-state actor*, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.

Hasil dari penulisan ini yang merupakan jawaban atas rumusan masalah peneliti dalam tesis yang ditulis bahwa diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tipe kebijakan *committed* ke arah *convenient*. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi

penolakan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari *lead country* menuju *veto country*.

Penelitian diatas, memiliki perbedaan dalam hal teori, namun dalam hal ini memiliki kesamaan yakni AS dalam membuat kebijakan luar negerinya melihat level domestiknya dan internasional dalam menganai isu lingkungan, bahwa ada pengaruh dari dalam negeri dan luar yang menjadikan sikap AS sebagai *lead country* dalam COP21 di Paris, sehingga AS meratifikasi *Paris Agreement*.

Keempat, penelitian dalam bentuk skripsi lain yang menjadi sebagai bahan pertimbangan penulis ialah skripsi Muhammad Derry Alfikry dengan judulnya “Sikap Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Obama dalam Negosiasi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Copenhagen Tahun 2009”²³ membahas mengenai berbagai faktor yang melatar belakangi pemboikotan Amerika Serikat terhadap hasil COP 15 di Copenhagen pada tahun 2009. Mencoba menjelaskan dengan menggunakan kerangka pemikiran *collective action problems* yang dikembangkan dalam tradisi konseptual rezim lingkungan hidup, yaitu resiko *free riding*, pembagian hak dan kewajiban yang tidak adil dan ketidakpastian komitmen anggota lainnya di masa depan. Faktor-faktor tersebut juga dikaitkan dengan konteks domestik

²³ Muhammad Derry Alfikry, 2014, *Sikap Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Obama dalam Negosiasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Copenhagen Tahun 2009*, Skripsi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta (dipublikasikan)

Amerika Serikat yang sedang berupaya pulih dari krisis ekonomi sejak tahun 2007. Penelitiannya menggunakan analisis kualitatif. Dari alat analisa kualitatif tersebut ia menyimpulkan bahwa teradapat dua akar masalah yang menyebabkan pembajakan Pemerintah Obama terhadap hasil COP 15, yaitu keterbatasan anggaran domestik untuk komitmen lingkungan global, dan ketidaksetujuan terhadap skema pembagian tanggung jawab dalam UNFCCC. Pemerintahan Obama mewarisi dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2007. Ini menyebabkan pemerintahannya harus berkonsentrasi pada penguatan ekonomi domestik, dan tidak dapat terlalu ambisius dalam agenda berskala global. Tidak hanya dari masyarakat, perusahaan-perusahaan domestik, yang merupakan penyumbang emisi terbesar, maupun partai oposisi mendesak agar Pemerintahan Obama berfokus pada perekonomian nasional. Terlebih lagi, Amerika Serikat tidak setuju dengan perbedaan pembebanan tanggung jawab dalam UNFCCC, terutama terkait Cina dan India. Amerika Serikat menuntut kedua negara tersebut dikategorikan sebagai annex I seperti Amerika Serikat. Berdasarkan alasan utama ini, Pemerintahan Obama memboikot hasil COP 15 Copenhagen dan memilih berfokus pada penyelamatan lingkungan di level domestik.

Penelitian terdahulu di atas sebagai pertimbangan dalam penelitian yang diangkat oleh penulis, berbeda dengan penelitian terdahulu diatas, penulis mencoba menjelaskan alasan AS meratifikasi *Paris Agreement*. Ratifikasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* dipengaruhi dari level internasional dan level domestik. Pada level internasional Presiden Obama

mendukung adanya hasil COP21, namun dihalangi oleh level domestik yaitu kongres Amerika Serikat. Selanjutnya, Penulis menggunakan teori *Two-Level Game Diplomacy* dalam menganalisis ratifikasi *Paris Agreement*. Adanya pengaruh level I (level internasional) dan level II (level domestik) dalam proses meratifikasi suatu perjanjian internasional.

1.1 Tabel Posisi Penelitian

Nama / Judul	Teori / Konsep	Hasil
Sulistyo Khoirul Mala, / <i>Two-Level Game</i> Jerman dalam Merespon Rencana Bailout Uni Eropa ke Yunani	Deskriptif, <i>Two-Level Game Theory</i> , konsep bailout	Hasil penelitian ini, dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah bailout tidak langsung keluar begitu saja. Ada negosiasi yang terjadi antara pemerintah dengan level I (internasional) dan level II (domestik) hingga akhirnya Jerman menyetujui rencana bailout UE ke Yunani.
Dewi Robi'ah / Penolakan Amerika Serikat terhadap Ratifikasi Protokol Kyoto pada Era George Walker Bush	Ekspalantif-argumentatif, teori politik luar negeri, konsep <i>free rider</i> , <i>national interest</i> , aktor rasional	Hasilnya, alasan penolakan AS terhadap ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto dikarenakan kepentingan nasional yaitu kepentingan ekonomi. Presiden George Wlker Bush sebagai aktor rasional dalam pembuatan keputusan akan memilih kebijakan yang dilihat dari kalkulasi untung rugi. Adanya kalkulasi rugi Bush lebih banyak dari pada keuntungan, oleh karena itu, AS mengimpelementasikan kebijakan luar negerinya sesuai dengan

		kepentingan nasionalnya. AS memilih untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut.
Jani Mediawati Sasanti / Diplomasi Lingkungan Amerika Serikat dalam Konvensi Perubahan Iklim (1992-2002)	Deskriptif-Analitis, konsep kepentingan nasional, politik luar negeri, pemikiran Rosseau formulasi politik luar negeri, teori Kegley dan Wittkopf komponen kebijakan luar negeri, multi-track diplomacy, pemikiran Suskind dan Thomas peran non-state actor.	Hasil dari penelitian ini, adanya diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tips kebijakan committed ke arah convenient. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi ketidakmauan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari lead country menuju veto country.
Muhammad Derry Alfikry / Sikap Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Obama dalam Negosiasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Copenhagen Tahun 2009	Kualitatif, neoliberal institusional, rezim internasional, rezim lingkungan dan <i>Collective action</i> .	Hasil penelitian ini ia menyimpulkan bahwa teradapat dua akar masalah yang menyebabkan pembajakan Pemerintah Obama terhadap hasil COP 15, yaitu keterbatasan anggaran domestik untuk komitmen lingkungan global, dan ketidaksetujuan terhadap skema pembagian tanggung jawab dalam UNFCCC.
Hazazi Ridho Subarkah / Sikap Veto Amerika Serikat terhadap Pembentukan Rezim Perubahan Iklim dalam COP21 di Paris	Eksplanatif, two- level game diplomacy	Ada pengaruh dari level internasional dan domestik sehingga AS meratifikasi hasil COP21 yakni <i>Paris Agreement 2015</i>

1.6 Landasan Teori / Konsep

1.6.1 *Two Level Game Diplomacy Theory*

Teori ini dikemukakan oleh Robert D. Putnam. Putnam memetaforakan interaksi domestik dan internasional yang berkaitan dengan peran diplomasi suatu negara. Ia berpendapat bahwa dibutuhkan strategi penyesuaian faktor-faktor domestik guna memperoleh posisi dalam percaturan internasional. Karena dalam sebuah interaksi di kancah internasional dibutuhkan interaksi antara kedua elemen atau level yakni level internasional dan level domestik.

Putnam menjelaskan bahwa pada hakikatnya seorang diplomat atau negosiator akan selalu berhadapan dengan *two-level games* atau permainan dua tingkat. Pada tingkat pertama, sang negosiator akan berhadapan dengan negara lain. Sementara tingkat kedua, sang negosiator akan berhadapan dengan wilayah domestiknya, yakni biasanya anggota parlemen, LSM, ataupun kelompok-kelompok domestik lainnya. Hasil dari negosiasi pada level kedua akan sangat mempengaruhi keberhasilan pada level pertama. Putnam lantas menguraikan mengenai pentingnya “*win-set*” atau tingkat kesepakatan di level kedua bagi suksesnya negosiasi level pertama. Artinya, semakin besar *win-set* dan semakin besar pula perundingan di level pertama mencapai keberhasilan.²⁴

Namun, dalam semua tingkatan baik itu nasional maupun internasional mempunyai peranan yang penting. Negosiasi yang dilakukan pada level I bersifat sementara karena keputusan akhir berada pada level II. Maka dari itu

²⁴ Robert D. Putnam, *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games* diakses dalam <http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2013/10/Putnam-The-Logic-of-Two-Level-Games.pdf> (26/04/2016 jam 09:19 WIB)

level I dan II harus berjalan dengan baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal pada masing-masing tingkatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam *two level game*, *win-set* (tingkat kesepakatan) karena besar kecilnya *win-set* dapat menentukan dalam proses ratifikasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi *win-set*, yaitu²⁵ :

- a. Prefrensi dan koalisi (level II): ukuran *win-set* sangat tergantung dari koalisi dan pilihan-pilihan yang ada pada level II berupa tekanan dari yang mendukung atau menentang perjanjian internasional tersebut.
- b. Institusi (level II) : praktek politik dalam negeri suatu negara berpengaruh dalam *win-set*, jika pengaruh dalam negeri (institusi) semakin dominan dalam level II maka akan semakin besar *win-set*. Namun, jika terlalu kuat institusi dalam pengaruhnya untuk membuat keputusan, dapat memperlemah posisi tawar di level I.
- c. Strategi negosiator (level I) : setiap negosiator dalam mencapai kesepakatan harus menghormati *win-set*nya sendiri. Namun satu sisi harus memaksimalkan *win-set* pihak lain. Hal ini menjadi dilemma tersendiri, bahwa dilain sisi ia harus memaksimalkan *win-set* pihak lain, ketika sang negosiator memaksimalkan pihak lain, ini akan memperlemah dari *win-set*nya sendiri.

Melalui teori ini dijelaskan bahawa alasan Amerika Serikat terhadap hasil COP21 di Paris yang menghasilkan *Paris Agreement*, dalam prosesnya peranan domestik sangat dominan sehingga AS tidak mendapat dukungan untuk

²⁵ Ibid.

meratifikasi perjanjian yang dihasilkan dalam COP21 di Paris. Yang mana dalam proses level pertama, Obama sebagai Presiden AS menaruh perhatian dan memberikan tanda-tanda akan menyetujui hasil dari COP21 di Paris.²⁶ Namun, oleh politik dalam negerinya sebagai level kedua hal tersebut tidak mendapat dukungan oleh parlemen. Kebanyakan dari parlemen ialah partai republik yang notabene merupakan partai yang mendukung perindustrian dalam negeri.²⁷

Namun, pada akhirnya pada level internasional, adanya negosiasi yang dilakukan pada pertemuan G20. China dan AS membicarakan mengenai hasil COP21, yang pada akhirnya kedua negara sepakat untuk meratifikasi hasil COP21 di Paris. Hal ini sesuai dengan hasil teori yang dikemukakan Putnam.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa

Variable yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen (unit analisa) yaitu perilaku yang hendak diseskripsikan, dijelaskan dan diprediksikan. Variabel independen (unit eksplanasi) yaitu yang dampaknya hendak diamati.²⁸ Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam variabel dependen ialah sikap Amerika Serikat mengani perjanjian isu perubahan iklim, dan variabel independennya ialah *Paris Agreement* dalam COP21 di Paris.

²⁶ *Op.cit*, CNNIndonesia

²⁷ *Upaya Perubahan Iklim Global Amerika Terhalang Partai Republik?*, diakses dalam <http://global.liputan6.com/read/2388823/upaya-perubahan-iklim-global-amerika-terhalang-partai-republik> (26/04/2016 jam 09:42 WIB)

²⁸ Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES, hal. 39

1.7.2 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode eksplanatif dimana penulis untuk mengamati fenomena dan menjelaskan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, namun juga ingin mengetahui mengapa peristiwa itu terjadi. Jika hal tersebut dikaitkan isu yang diangkat penulis ini maka penelitian ini ingin mengetahui alasan *AS meratifikasi Paris Agreement*. Lebih jelasnya lagi tipe penelitian ini ingin menjelaskan apa saja yang menjadi pengaruh dan penyebab dari alasan *Amerika Serikat meratifikasi Paris Agreement*.

1.7.3 Teknik Analisa Data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif peneliti berusaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teori sebagai dasar penting dalam penelitian. Serta bagian akhir ini nantinya akan mempengaruhi dalam proses pembentukan hipotesa dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi literatur dalam teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai refrensi, seperti : buku, jurnal, artikel, surat kabar dan data yang bersumber dari situs-situs resmi, terpercaya dan dapat

dipertanggung jawabkan. Sehingga sumber-sumber tersebut penulis kembangkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun agar tidak terjadi perluasan penelitian, untuk mempermudah dalam menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan alasan Amerika Serikat meratifikasi *Paris Agreement* maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian menjadi dua sudut pandang, yaitu :

A. Batasan Materi

Untuk mempermudah dalam proses penelitian, penulis menggunakan batas materi yang berfokus pada alasan AS dalam meratifikasi *Paris Agreement* yang dipengaruhi oleh kondisi pada level domestik dan level internasional. Serta, respon AS dalam masalah perubahan iklim.

B. Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah pada lingkup masa pertemuan mengenai isu perubahan iklim pada rentan waktu 2015-2016. Yang mana terjadi kesepakatan *Paris Agreement* pada tahun 2015 hingga 2016, sebelumnya telah ada pertemuan COP untuk menyepakati rancangan apa yang harus dilakukan sehingga tercapai hasil yang ada dalam *Paris Agreement*.

1.8 Hipotesa

Penulis dalam penelitian ini memiliki hipotesa atau jawaban sementara, bahwasanya Amerika Serikat meratifikasi *Paris Agreement* dalam COP21 di Paris. Berdasarkan *two-level game diplomacy theory* Amerika Serikat memiliki

alasan yang dipengaruhi oleh level domestik dan level internasional. Pada level domestik Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan parlemen untuk menyepakati ratifikasi atau tidak meratifikasi *Paris Agreement*, parlemen dalam hal ini didominasi oleh partai republik sehingga sebagian besar anggota parlemen menolak untuk meratifikasi *Paris Agreement*. Pada level internasional Amerika Serikat dipengaruhi oleh pergaulan internasional yang ia ikuti dalam hal ini pada pertemuan COP 21 di Paris. Selain itu, Amerika Serikat melihat dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim yang terjadi, bahwa dampak tersebut menjadi permasalahan global. Amerika Serikat juga ingin menjadi *Lead State* dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Sehingga dapat penulis mengasumsikan bahwa *two-level game diplomacy theory* relevan dengan fenomena yang penulis kaji dalam penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB	PEMBAHASAN
BAB I PENDAHULUAN	Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori/konsep, metodologi penelitian (variable penelitian dan analisa, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta batasan waktu dan materi), hipotesa, dan sistematika penulisan.
BAB II LEVEL PERTAMA (LEVEL DOMESTIK) DIPLOMASI PADA COP21 PARIS	2.1 Perubahan Iklim Sebagai Masalah Global 2.2 Kepentingan Negara Anggota terkait Perubahan Iklim 2.2.1 Kerjasama Nagara Maju dan Berkembang dalam Mengatasi Perubahan Iklim 2.2.2 Kepentingan Negara Anggota UNFCCC 2.3 Conference of Parties (COP) ke 21 di Paris 2.4 Komitmen Amerika Serikat dalam <i>Paris Agreement</i>

	2.5 Posisi China dalam Mempengaruhi Amerika Serikat Ratifikasi <i>Paris Agreement</i>
BAB III LEVEL KEDUA (LEVEL DOMESTIK) ANALISA FAKTOR YANG MENYEBABKAN AS MERATIFIKASI HASIL COP21 PARIS	<p>Dalam bab ketiga, peneliti berusaha menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan AS meratifikasi hasil perjanjian mengenai isu perubahan iklim dalam COP21 di Paris, dan menganalisisnya menggunakan teori.</p> <p>3.1 Analisa Sikap Amerika Serikat dalam meratifikasi <i>Paris Agreement</i> Menggunakan <i>Two-level game diplomacy theory</i>.</p> <p>3.2 Obama Sebagai <i>Chief Negotiator</i> dalam COP 21</p> <p>3.3 Level Kedua (Level Domestik)</p> <p>3.3.1 Respon Kongres Amerika Serikat terhadap COP 21</p> <p>3.3.2 EPA Mendukung <i>Chief Negotiator</i></p> <p>3.3.3 <i>Civil Society</i> dalam Mempengaruhi Ratifikasi <i>Paris Agreement</i></p> <p>3.4 Level Pertama (Level Internasional)</p> <p>3.4.1 Jumlah Negara yang Meratifikasi <i>Paris Agreement</i> dan ratifikasi China</p> <p>3.4.2 <i>Global Civil Society</i> mempengaruhi Ratifikasi <i>Paris Agreement</i></p> <p>3.4.3 Diplomasi China - Amerika Serikat terhadap Ratifikasi <i>Paris Agreement</i>.</p>
BAB IV KESIMPULAN	<p>Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan dan saran mengenai alasan AS dalam menangani isu perubahan iklim, yang pada mulanya tidak mau meratifikasi hingga pada akhirnya meratifikasi <i>Paris Agreement</i>.</p>